

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**



2026

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum.....	2
I.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	4
I.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
I.4. Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5
BAB II. RENCANA STRATEGIS	6
II.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	6
II.2. Program dan Kegiatan.....	7
II.3. Target dan Realisasi Renstra 2023 s/d 2025	9
II.4. Program, Kegiatan dan Anggaran.....	23
BAB III. PENUTUP	27



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1

Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target	7
---	----------

TABEL 2.2

Target, Capaian dan Realisasi Tahun 2023-2025	9
---	----------

TABEL 2.3

Program/Kegiatan, Pagu dan Realisasi Capaian Keuangan Tahun 2025	11
--	-----------

TABEL 2.4

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026	24
--	-----------



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ini merupakan salah satu tolok ukur untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2025. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2026 mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menjadi alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Tenggarong, 30 Januari 2026

PIH. KEPALA DINAS


Akhmad Taufik Hidayat, S.IP., MM
Pembina Utama Muda - (IV/c)
NIP. 19670420 198803 1 014



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berhubungan langsung dengan pelayanan sehingga Kualitas penyusunan Rencana Kerja Tahunan akan menentukan kualitas pelayanan pada Pimpinan dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kinerja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan akhir RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kinerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

- A. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- B. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kinerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan



- dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- C. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
 - D. Program dan kegiatan /sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Rencana Kinerja Tahunan dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat daerah dan RKPD. Rencana Kinerja Tahunan merupakan masukan Utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA. Maksud dari Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026 yang menggambarkan capaian kinerja.

I.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas



Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

I.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

I.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai

tugas pokok :

“Membantu Bupati, meaksanakan Urusan Pemerintahan ynag menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja”

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan

fungsi :

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi da Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati Pelaksanaan Unit

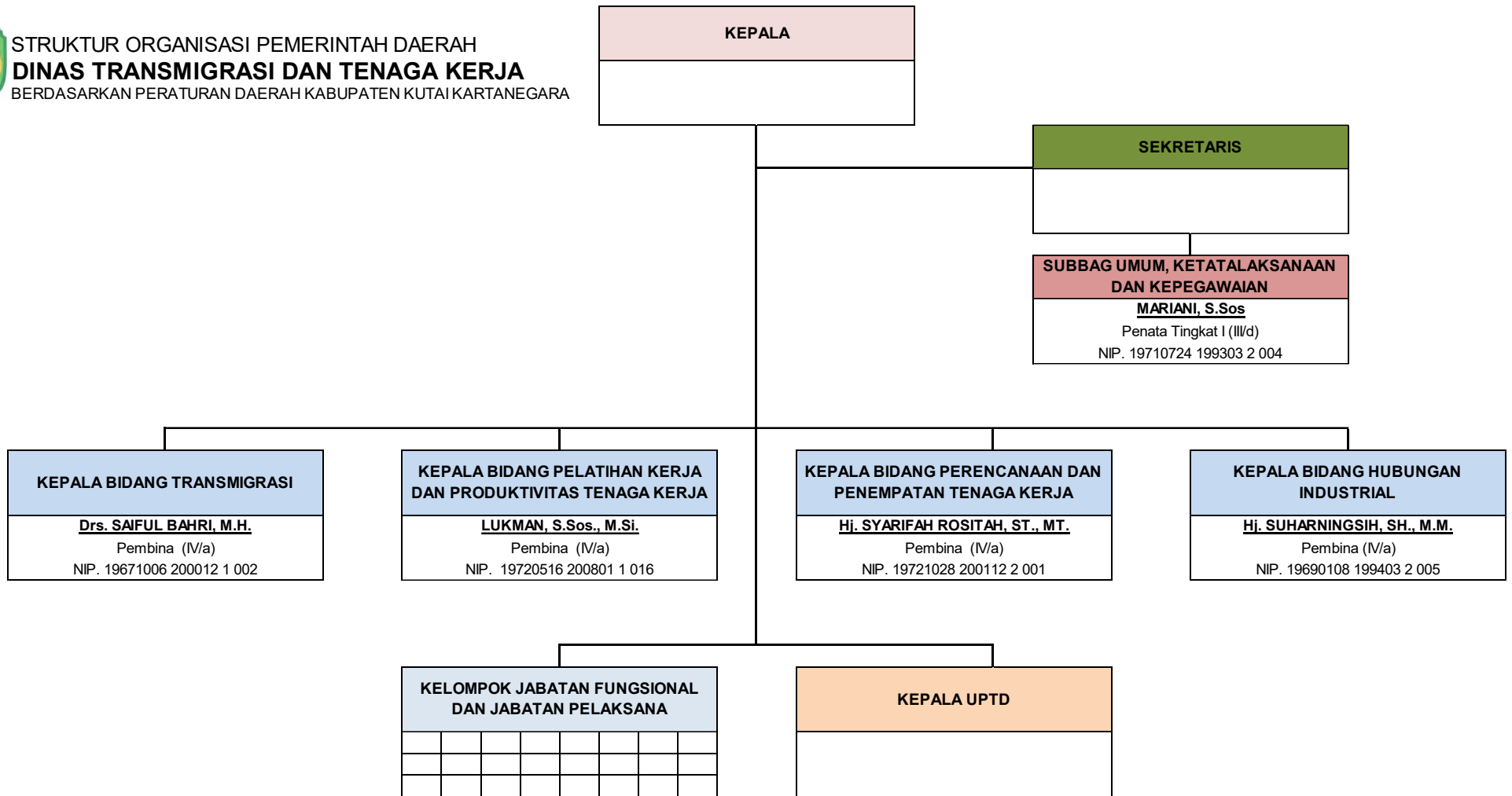
I.4. Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- c. Bidang Transmigrasi;
- d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- f. Bidang Hubungan Industrial;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA





BAB II

RENCANA STRATEGIS

II.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Perangkat daerah menyusun Rencana Program yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, dengan Visi : "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan." dan Misi ke-1 yaitu Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah "PROGRAM ETAM SEJAHTERA".

Dirumuskan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu ;

1. Meningkatkan kualitas kesempatan kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tersebut ditetapkan 5 (lima) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan pembangunan kawasan perdesaan
2. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja
3. Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal
4. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan
5. Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah

Selanjutnya berdasarkan sasaran tersebut ditetapkan indikator sasaran, sebagai berikut :



Tabel 2.1
Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persen	25	Bidang Transmigrasi
2.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja
3.	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	22,93	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	24,43	Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja
5.	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Persen	100	Bidang Hubungan Industrial

II.2. Program dan kegiatan

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diikuti dengan dilakukannya perubahan dalam dokumen perencanaan, termasuk Rencana Strategis yang memuat tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator dan target Perangkat Daerah selama 5 tahun.

Sesuai tugas dan fungsinya maka selama kurun waktu 2025-2029 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara akan melaksanakan 7 (tujuh) program, yang didukung oleh 18 (delapan belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Program : Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah



Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- g) Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya Kompetensi Dan Kapasitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
- b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- c) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Bekerja di Sektor
Formal

Kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran Program : Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Bekerja di Sektor
Formal

Kegiatan :

- a) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

5. Program Hubungan Industrial

Sasaran Program : Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis,



Dinamis Dan Berkeadilan Antara Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara Dengan Perusahaan

Kegiatan :

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Sasaran Program : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kawasan
Perdesaan

Kegiatan :

- a) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Sasaran Program : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kawasan
Perdesaan

Kegiatan :

- a) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

II.3 Target dan Realisasi Renstra Tahun 2023 s/d 2025

Target dan Realisasi Tahun 2023-2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target, Capaian dan Realisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2023-2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI					
				TARGET 2023	REALISASI	TARGET 2024	REALISASI	TARGET 2025	REALISASI
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,30	81,80	71,50	70,92	73	71,76



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI					
				TARGET 2023	REALISASI	TARGET 2024	REALISASI	TARGET 2025	REALISASI
	Tenaga Kerja								
2.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	18,59	22,90	20,50	22,77	24,34	23,21
3.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Ditempatkan	Persen	8,39	13,75	10,37	18,86	12,35	11,15
4.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Indeks Transmigrasi	Dokumen	4	3	4	4	5	60

Dari tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa di akhir periode di tahun 2025, terhadap 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk masing-masing sasaran diperoleh capaian kinerja 100%.

Selanjutnya rincian realisasi anggaran Tahun 2025 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
Program/Kegiatan, Pagu dan Realisasi Capaian Keuangan
Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah			12.605.992.012,00	10.530.350.513,00	83,53
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			460.385.021,00	303.429.390,00	65,91
1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	23.440.000,00	8.760.000,00	37,37
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Laporan	58.513.880,00	19.230.000,00	32,86
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	10.460.000,00	6.730.000,00	64,34
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	282.537.441,00	210.805.390,00	74,61



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	19.040.000,00	13.205.000,00	69,35
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	66.393.700,00	44.699.000,00	67,32
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			10.164.857.601,00	8.960.467.581,00	88,15
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	Orang/ Bulan	10.021.064.958,00	8.874.968.581,00	88,56
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10.532.000,00	-	-
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	125.196.643,00	85.499.000,00	68,29
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	8.064.000,00	-	-



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset daerah yang di pelihara			81.086.000,00	38.760.000,00	47,80
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	18.478.000,00	9.600.000,00	51,95
12	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	39.460.000,00	19.560.000,00	49,57
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	23.148.000,00	9.600.000,00	41,47
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara			170.643.000,00	93.104.792,00	54,56
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81	Orang	4.740.000,00	-	-
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	23.500.000,00	9.990.000,00	42,51
16	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	42.835.000,00	37.518.000,00	87,59
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	69.162.000,00	27.240.000,00	39,39



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69	Orang	24.346.000,00	18.356.792,00	75,40
19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	6.060.000,00	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum			274.535.070,00	244.687.805,00	89,13
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	29.688.300,00	29.301.003,00	98,70
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	21.943.600,00	21.404.560,00	97,54
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	24.469.250,00	22.876.393,00	93,49
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.354.200,00	16.094.596,00	53,02
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	18.800.000,00	18.281.800,00	97,24
25	Penyediaan Bahan/Materai	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2	Paket	21.388.420,00	17.028.000,00	79,61
26	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	17.428.500,00	14.152.282,00	81,20



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	12	Laporan	110.462.800,00	105.549.171,00	95,55
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan			42.670.000,00	32.528.450,00	76,23
28	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	3.940.000,00	-	-
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	38.730.000,00	32.528.450,00	83,99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			886.075.320,00	629.162.821,00	71,01
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.830.000,00	1.000.000,00	26,11
31	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	299.788.500,00	192.970.799,00	64,37
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	69.820.000,00	66.280.002,00	94,93



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	512.636.820,00	368.912.020,00	71,96
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset yang di pelihara			525.740.000,00	228.209.674,00	43,41
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	275.934.000,00	129.506.674,00	46,93
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000,00	3.902.000,00	2,60
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	99.806.000,00	94.801.000,00	94,99
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya			3.143.833.400,00	2.910.553.348,00	92,58
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan			3.089.095.000,00	2.887.333.348,00	93,47
37	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	185	Orang	3.089.095.000,00	2.887.333.348,00	93,47



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			15.225.850,00	10.060.000,00	66,07
38	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15	Lembaga	15.225.850,00	10.060.000,00	66,07
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif			15.350.150,00	9.990.000,00	65,08
39	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25	Perusahaan	15.350.150,00	9.990.000,00	65,08
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas			24.162.400,00	3.170.000,00	13,12
40	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah	1	Dokumen	24.162.400,00	3.170.000,00	13,12
III	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja			148.167.500,00	123.932.630,00	83,64
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah			148.167.500,00	123.932.630,00	83,64
41	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	148.167.500,00	123.932.630,00	83,64
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri			6.594.047.540,00	4.566.360.044,00	69,25
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Antar Kerja			6.384.574.840,00	4.369.410.104,00	68,44



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
42	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	60	Orang	105.715.500,00	95.600.940,00	90,43
43	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50	Orang	54.720.050,00	42.125.575,00	76,98
44	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100	Orang	101.474.000,00	81.862.000,00	80,67
45	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30	Orang	68.291.500,00	53.113.000,00	77,77
46	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	671	Orang	6.054.373.790,00	4.096.708.589,00	67,67
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Layanan Antar Kerja			209.472.700,00	196.949.940,00	94,02
47	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	110	Orang	209.472.700,00	196.949.940,00	94,02
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial			8.848.883.950,00	6.669.268.143,00	75,37



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan Serta Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan			248.792.900,00	160.889.310,00	64,67
48	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25	Perusahaan	75.924.500,00	49.897.310,00	65,72
49	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25	Perusahaan	51.708.400,00	43.412.000,00	83,96
50	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	Laporan	121.160.000,00	67.580.000,00	55,78
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan			8.600.091.050,00	6.508.378.833,00	75,68



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
51	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50	Perkara	67.934.500,00	46.887.340,00	69,02
52	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100	Perkara	79.929.000,00	44.171.655,00	55,26
53	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	Asosiasi	71.837.900,00	47.472.080,00	66,08
54	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	43.929.950,00	28.936.000,00	65,87
55	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729	Orang/ Bulan	8.336.459.700,00	6.340.911.758,00	76,06
VI	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan			131.386.100,00	68.939.625,00	52,47



NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	PAGU INDIKATIF	REALISASI	PERSENTASE (%)
	TRANSMIGRASI						
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans			131.386.100,00	68.939.625,00	52,47
56	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1	Dokumen	131.386.100,00	68.939.625,00	52,47
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi			350.151.560,00	209.811.950,00	59,92
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Desa/Kimtrans yang di Kembangkan			350.151.560,00	209.811.950,00	59,92
57	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	70	Kepala Keluarga (KK)	210.378.900,00	168.177.500,00	79,94
58	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	Satuan Permukiman	139.772.660,00	41.634.450,00	29,79
JUMLAH					31.822.462.062,00	25.079.216.253,00	78,81



Berdasarkan tabel diatas pagu anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 31.822.462.062,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.079.216.253,- atau sebesar 78,81%. Diharapkan tahun 2026 persentase penyerapan anggaran lebih baik dari tahun sebelumnya.



II.4. Program, Kegiatan dan Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan peningkatan pelayanan publik serta peningkatan sumber daya aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disusun Program dan Kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah, program urusan wajib dan program urusan pilihan seperti pada Tabel dibawah ini:

TABEL 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
I	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,00%	13.236.298.225
I			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	50.000.000
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.000.000
II			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	7 Laporan	11.095.129.425
2			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang / Bulan	10.975.529.425
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000
4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	114.600.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
III			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD Yang Mendapatkan Pengamanan	3 Laporan	29.800.000
5			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000
6			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.800.000
IV			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	10 Layanan	368.716.800
7			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
8			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000
9			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
10			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	13.716.800
11			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.000.000
12			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	225.000.000
V			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.016.492.000
13			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
14			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	666.492.000
VI			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang di pelihara	30 Unit	676.160.000
15			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	248.160.000
16			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.000.000
17			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000
18			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000
II	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	59,10%	9.976.013.000
VII			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	755 Orang	9.976.013.000
19			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	755 Orang	9.976.013.000
III	Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	52,18%	2.445.550.000
VIII			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan antar kerja	2 Layanan	2.251.904.500
20			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	71.904.500



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
21			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	680 Orang	2.180.000.000
IX			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	1 Event	193.645.500
22			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 Orang	193.645.500
IV	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan	Persentase Fasilitas Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100%	8.672.488.400
X			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang undangan	150 Perusahaan	8.672.488.400
23			Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.729 Orang	8.672.488.400
JUMLAH						34.330.349.625

Berdasarkan tabel diatas, untuk mencapai sasaran strategis Pemerintah Daerah melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara membutuhkan anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp. 34.330.349.625,- Dengan rencana kinerja tahunan ini, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menaruh harapan besar agar masyarakat penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bantuan sesaat, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi komunitas yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Program ini diharapkan menjadi investasi sosial jangka panjang yang memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Kartanegara.



BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKT-PD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program kegiatan dan sub-kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026 ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2026 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Kinerja Tahunan ini secara umum menguraikan program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta indikator dan target kinerja dimana untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (Outcomes). Maka dengan mempedomani Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-PD, diharapkan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja PD untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati Kutai Kartanegara. Yang terpenting bahwa Rencana Kinerja Tahunan ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Semoga dengan telah disusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2026 ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sebagai komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP).

Pt. KEPALA DINAS

Akhmad Taufik Hidayat, S.IP., MM
Pembina Utama Muda – (IV/c)
NIP. 19670420 198803 1 014

Pembina Utama Muda – (IV/c)

NIP. 19670420 198803 1 014

